

Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat

(Studi Kasus Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016)

Meriwijaya, Suranto

Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
meriwijaya@gmail.com

Abstrak — Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat baik di tingkat lokal maupun global. Seperti halnya yang terjadi di desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Adanya pengembangan sektor pariwisata dengan obyek wisata Goa Pindul telah mengubah perekonomian masyarakat desa Bejiharjo. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan obyek wisata tersebut muncul berbagai permasalahan yang berujung konflik. Konflik yang terjadi disebabkan adanya struktur ekonomi yang membuka kesempatan untuk dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan, dimana obyek wisata Goa Pindul dianggap sebagai aset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisa tentang konflik dan resolusi konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan, observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini, Pertama konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul disebabkan adanya struktur ekonomi yang membuka kesempatan untuk dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan serta, ketiadaan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul dan Adanya perbedaan pemahaman tentang sistem kepemilikan tanah yang dapat dimiliki secara pribadi oleh masyarakat. Kedua, Strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik ini ialah strategi menanganing (Win-win Strategy), dimana pemerintah Kabupaten Gunungkidul berperan sebagai pihak ketiga yaitu penengah dari pihak yang berkonflik, Peran pemerintah sebagai regulator di dalam menangani konflik antar sesama kelompok sadar wisata terlihat dengan lahirnya regulasi tentang penyelenggaraan kepariwisataan yaitu lahirnya Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Kata Kunci: Pariwisata, konflik, dan Resolusi Konflik

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat baik di tingkat lokal maupun global. Sektor pariwisata kini telah menjadi kebutuhan global. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri, termasuk industri pariwisata. Saat ini industri pariwisata merupakan bagian dari salah satu sentral penghasil devisa bagi negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia.

Salah satu prinsip kepariwisataan yang terkandung dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah memberdayakan masyarakat setempat dimana masyarakat berhak berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan dan berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Senada dengan perihal di atas, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), merupakan salah satu wilayah tujuan wisata di Indonesia yang menawarkan berbagai macam obyek wisata, baik obyek wisata alam, wisata pantai, maupun wisata budaya. Salah satu daerah tujuan wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kaya akan obyek dan daya tarik wisata adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan di kabupaten Gunungkidul memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, karena sektor ini merupakan sektor yang dapat diandalkan mengingat di daerah Gunungkidul terdapat berbagai macam obyek wisata yang sangat menarik, baik berupa wisata alam, buatan dan wisata sejarah. Salah satu obyek wisata di Kabupaten Gunung Kidul yang berhasil dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat yaitu obyek wisata Goa Pindul.

Obyek wisata yang diresmikan pada tahun 2010 ini, telah berhasil dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat yang dipelopori oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat setempat. Berikut data kunjungan wisatawan dan pendapatan obyek wisata Goa Pindul:

TABLE I. DATA PENGUNJUNG DAN PENDAPATAN GOA PINDUL

No	Tahun	Data Wisatawan (Orang)			Pendapatan/ Th (Dalam Rupiah)
		Lokal	Asing	Jumlah	
1	2010	98	-	98	460.000
2	2011	4.928	493	5.421	162.630.000
3	2012	59.312	891	60.203	1.806.090.000
4	2013	71.716	2428	74.144	2.187.338.000

Sumber : Sekretariat Pokdarwis Dewa Bejo 2016

Di balik keberhasilan dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata Goa Pindul di sisi lain mulai memunculkan konflik dalam masyarakat. Konflik ini bermula ketika pemilik tanah yang ada di atas obyek wisata goa pindul mengklaim mempunyai hak atas pengelolaan Goa Pindul dan berupaya menghentikan pengelolaan obyek wisata tersebut, akan tetapi masyarakat melakukan penolakan sehingga berujung pada gugatan pemilik tanah atas hak kepemilikan tanah tersebut kepada pihak yang berwajib.

Selain permasalahan diatas, potensi obyek wisata goa pindul juga menginspirasi lahirnya kelompok- kelompok sadar wisata yang baru di Desa Bejiharjo namun, kehadiran kelompok-kelompok sadar wisata tersebut mulai menimbulkan permasalahan ketika diantara sesama kelompok sadar wisata saling klaim atas hak melakukan pengelolaan terhadap obyek wisata Goa Pindul.

Dari permasalahan-permasalahan di atas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai resolusi konflik dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dengan obyek wisata Goa Pindul desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu "Bagaimana konflik dan resolusi konflik dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dengan obyek wisata Goa Pindul, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul"

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk menggambarkan dan menganalisa tentang konflik dan resolusi konflik dalam

pengelolaan obyek wisata Goa Pindul, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

2. Manfaat Penelitian:

a. Manfaat Teoritis.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan bidang Pemerintahan khususnya tentang konflik dan resolusi konflik pengelolaan pariwisata.
- 2) Memperkaya *kehasanah* kajian pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata.

b. Manfaat Praktis.

- 1) Bagi Pemerintah (Pihak Terkait), dapat menjadi bahan rujukan pengambilan keputusan dalam rangka penanganan konflik pengelolaan pariwisata.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sumber informasi atau bahan masukan bagi semua pihak yang terkait dengan konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul.
- 3) Dapat dijadikan referensi atau pedoman bagi penelitian selanjutnya tentang konflik dan resolusi konflik, khususnya konflik dalam pengelolaan pariwisata.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai resolusi konflik dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dengan obyek wisata Goa Pindul, desa Bejiharjo, kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk menentukan resolusi konflik dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di daerah-daerah lainnya. Berikut kami sajikan beberapa kajian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

TABLE II. PENELITIAN TERDAHULU

No	Penelitian	Hasil
1	Wedkita (2016) tentang analisis konflik penggunaan lahan dalam pertambangan liar di suaka margasatwa kuala lupak kabupaten barito kuala provinsi kalimantan selatan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dalam penelitian ini adalah tidak berjalan sinergisnya dua kepentingan yaitu kepentingan ekologis dan kepentingan ekonomis di dalam suatu kawasan konservasi Suaka Margasatwa Kuala Lupak.
2	Supriyono (2016) tentang Dinamika konflik pemanfaatan ruang di	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan lindung di Desa Dabong sebagai sebuah fenomena sosial melibatkan tiga aspek yaitu <i>space</i> (kawasan hutan

No	Penelitian	Hasil
	kawasan hutan lindung	lindung), <i>actor (stakeholder</i> baik pemerintah maupun masyarakat) dan <i>activity</i> (kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tata pemerintahan).
3	Basyori (2014) tentang Konflik Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu 'Antara Kebutuhan Konservasi dan Pariwisata'	Hasil dari penelitian ini yaitu konflik pengelolaan Cagar alam Pulau Sempu, merupakan konflik terkait kebijakan atau peraturan yang ada. Peraturan yang ada merupakan batas, yang menentukan kegiatan apa saja yang diperbolehkan dalam batasan ketentuan yang berlaku.
4	Syafran (2016) tentang Konflik Pertanahan Dalam Kebijakan Pertambangan Pasir Besi Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta	Hasil dari penelitian tersebut yaitu konflik pertanahan dalam kebijakan pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo DIY terjadi karena perbedaan persepsi aktor-aktor tentang status tanah dan risiko kebijakan serta perbedaan kepentingan aktor-aktor atas nilai tanah, yang telah memberikan pengaruh besar terhadap kemunculan konflik vertikal dalam kebijakan pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo DIY.
5	Nico (2016) tentang Manajemen Pasca Konflik (Menjaga Dan Membangun Perdamaian Jangka Panjang) Di Kabupaten Lampung Timur	Hasil penelitian tersebut yaitu berbagai konflik yang hadir di tengah masyarakat Lampung Timur sejak era orde Baru hingga saat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua type yaitu bersifat horizontal dan Vertical. Kecenderungan konflik yang terus tereproduksi di Lampung Timur memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari penyebab hingga latar belakang konflik.

Adapun road map penelitian ini sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, Bab ini mendeskripsikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II, Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori. Pada bab ini mendeskripsikan Kerangka Dasar Teori yang digunakan, Definisi Konseptual, dan Definisi Operasional.

BAB III, Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengambilan Sampel, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB IV, Deskripsi Objek Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan mengenai wilayah penelitian dan objek penelitian yang di gunakan oleh peneliti.

BAB V, Pembahasan. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

BAB VI, Penutup. Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, kesimpulan, saran dan rekomendasi.

E. Landasan Teori

1. Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *Configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Menurut Pruitt dan Rubin (2009: 9) mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*Perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkan, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya.

a. Faktor Penyebab Konflik

Faktor penyebab konflik (Soerjono Soekanto, 2006: 91-92), antara lain:

- 1) Perbedaan antara individu-individu
Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan di antara mereka.
- 2) Perbedaan kebudayaan
Perbedaan kepribadian dari orang perorang tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.
- 3) Perbedaan kepentingan
Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.
- 4) Perubahan sosial
Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya

b. Bentuk Konflik

Menurut Mulhan (2001 : 41) , ada dua jenis konflik utama.

- 1) Konflik vertikal adalah konflik elit dan massa rakyat. Elit disini bisa para pengambil kebijakan di tingkat pusat (pemerintah pusat), kelompok bisnis, atau aparat militer. Hal yang menonjol dalam konflik ini adalah digunakan instrumen kekerasan negara,

sehingga timbul korban dikalangan massa rakyat. Kasus-kasus, seperti konflik atas sumber-sumber agraria (tanah, tambang, perkebunan, dll) atau kelompok mengenai kedaulatan daerah. Konflik ini menjadi penting dan mendesak untuk memperoleh perhatian, sebab kehadiran konflik ini sangat erat dengan proses demokratisasi.

- 2) Kedua, konflik horisontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan massa rakyat sendiri. (Mul Khan, 2001: 41).

c. Dampak Konflik

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001).

1) Dampak Positif Konflik

- a) Memperjelas batas-batas diri
Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat memiliki tanggung jawab atas hak dan kewajiban yang mereka miliki.
- b) Memunculkan argumen dalam diskusi ilmiah
Perbedaan pendapat dalam dunia ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang wajar, karena tiap ahli memiliki sudut pandang dan argumentasi yang berbeda.
- c) Menguatkan solidaritas kelompok
Salah satu upaya menguatkan solidaritas dalam kelompok adalah membuat musuh bersama bagi kelompoknya.
- d) Adanya hikmah yang dapat dipetik
Ungkapan ada hikmah di balik peristiwa yang terjadi merupakan ungkapan yang sangat tepat untuk menjelaskan adanya hikmah di balik konflik yang terjadi.

2) Dampak Negatif Konflik

- a) Perpecahan
Akibat negatif dari konflik adalah terjadinya perpecahan dalam banyak hal dan peristiwa.
- b) Permusuhan
Permusuhan dapat muncul jika konflik tidak terselesaikan dengan baik. Dendam yang selama ini ada akan tetap tersimpan, dan dendam tersebut sebagai biang keladi (penyebab utama) bagi terjadinya permusuhan.
- c) Balas dendam
Dendam merupakan gejala yang banyak kita dapatkan dari konflik yang terjadi, mereka berharap suatu saat dapat membalas kekalahan yang dialaminya.
- d) Kekerasan
Kekerasan merupakan tindakan fisik dan non fisik yang ditujukan kepada orang lain yang lebih lemah keberadaannya.

d. Aktor – Aktor Konflik

Aktor-aktor penting yang terlibat dalam protes-protes agraria di berbagai tempat adalah komunitas lokal pemilik tanah atau pengontrol tanah, yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin komunitas setempat melawan pemerintah-pemerintah setempat serta polisi dan tentara, dan manajemen perusahaan-perusahaan berskala besar (Afriзал, 2006: 54). Ada tiga hal yang akan dijelaskan dalam bagian ini:

- 1) komunitas lokal meminta bantuan kepada aparaturnegara untuk menyelesaikan konflik antara mereka dengan perusahaan, tetapi karena aparaturnegara tidak responsif terhadap tuntutan mereka atau karena responnya tidak menguntungkan komunitas setempat itu terjadilah konflik antara komunitas setempat dengan aparaturnegara.
- 2) Komunitas tempat memprotes aparaturnegara itu sendiri berkaitan dengan tanah mereka yang dipakai oleh negara untuk proyek-proyeknya.
- 3) Komunitas lokal berkonflik dengan aparaturnegara berhubungan dengan aktivitas-aktivitas mereka membebaskan tanah.

2. Resolusi Konflik

Menurut Mindes (2006: 24) Resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam kehidupan manusia.

Ada beberapa cara resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Menurut Johan Galtung (1996: 21), konflik dapat dicegah atau diatur jika pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan cara atau metode menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk mengatur konflik. Johan Galtung kemudian menawarkan beberapa model yang dapat dipakai sebagai proses resolusi konflik, meliputi *peace making*, *peace keeping*, dan *peace building*.

a. Peace Making

Tahap awal ketika konflik muncul adalah untuk sesegara mungkin menciptakan suatu perdamaian. Perdamaian dapat diwujudkan dengan daya upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan di dalamnya (Galtung dalam Jamil, 2007: 72).

Ada beberapa metode yang bisa diterapkan dalam mewujudkan suatu perdamaian ini setidaknya dalam rangkaian perwujudan

perdamaian dalam konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul, dapat menggunakan pendekatan resolusi konflik yang dikemukakan oleh: (Ikhsan Malik 2003: wirawan, 2010 : Mitchel, 2007: Christoper A. Moore dalam Wirawan, 2010) sebagai berikut.

1) Coercive

Pemerintah dapat melakukan kebijakan intervensi sebagai upaya untuk mengendalikan konflik dengan pemaksaan secara fisik (coercive Capacity). Hal ini dapat berupa ancaman dan penjatuhan sanksi kepada pihak yang berkonflik. Selain itu coercive juga digunakan dalam tahap genting, terutama dalam hal menghentikan konflik terbuka yang sedang terjadi

2) Litigasi

Litigasi merupakan penyelesaian konflik dengan mengedepankan jalur hukum sebagai faktor penyelesaiannya, namun di sini perlu dicermati, Pemilihan jalur litigasi untuk menyelesaikan konflik harus dipertimbangkan secara bijak karena memiliki beberapa hambatan. *Pertama*, proses peradilan menyerap banyak waktu dalam jangka panjang. *Kedua*, badan peradilan cenderung berpihak kepada penguasa, akibatnya, terdapat kecenderungan untuk mengalahkan kepentingan rakyat tertindas

3) Non-litigasi

Model non-litigasi merupakan model penyelesaian konflik yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian konflik dengan cara non litigasi dapat mengakomodasi segala macam kepentingan yang ada di masyarakat. Model non litigasi biasanya direpresentasikan dalam model negosiasi, mediasi maupun arbitraasi, dimana didalamnya biasanya akan mendapatkan suatu kemenangan bersama (*win-win solution*).

Menurut Fisher (2001) menjaga perdamaian adalah kegiatan memantau dan menegakkan kesepakatan, menggunakan kekerasan bila perlu. Caranya mencakup pengawasan terhadap dihormatinya kesepakatan dan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang disepakati. Peace keeping pun dalam tata perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial terutama yang tertuang dalam pasal 7. Dari hal tersebut dilihat bahwa *peace keeping* merupakan upaya awal yang dilakukan untuk menghindari agar eskalasi konflik tidak muncul kembali.

b. Peace Building

Tahap krusial selanjutnya setelah *peace making* dan *peace keeping* adalah perwujudan *Peace building*. Berbagai tahap tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian resolusi konflik yang

dikatakan (Galtung:1996). Menurut Galtung *peace building* diartikan sebagai strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik.

Menurut Galtung, proses *peace building* merupakan proses jangka panjang yang penelusuran dan penyelesaian akar konflik, mengubah asumsi-asumsi kontradiktif, serta memperkuat elemen yang dapat menghubungkan pihak-pihak yang bertikai dalam suatu formasi baru damai mencapai perdamaian positif.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dimana metode yang digunakan menekankan pada proses penelusuran data atau informasi hingga dirasakan telah cukup digunakan untuk membuat suatu interpretasi. Menurut Maleong (2001: 3), penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian.

Metode penelitian ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengungkapkan fakta dan fenomena yang di temukan dalam menentukan resolusi konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul, kabupaten gunungkidul. menyuguhkan dengan apa adanya tanpa ada rekayasa dari peneliti dan sesuai dengan tujuan penelitian.

B. Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan oleh peneliti yakni :

1. Data primer merupakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden berupa keterangan yang bersumber dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul selaku wakil pemerintah yang membidangi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, Kepala Desa Bejiharjo selaku pemerintah setempat, kelompok sadar wisata selaku pengelola obyek wisata Goa Pindul, masyarakat sekitar obyek wisata, pengunjung dan pelaku wisata lainnya terkait dengan resolusi konflik pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yakni, buku-buku, artikel ilmiah, website, jurnal, rujukan tesis terdahulu, catatan-catatan, koran

dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh peneliti meliputi data peningkatan pengunjung dan pendapatan obyek wisata goa pindul, data kelompok sadar wisata dari pemerintah desa Bejiharjo, dan dokumen- dokumen sengketa lahan dan penyelesaiannya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti langsung terlibat dalam proses pengumpulan informasi melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun pihak yang akan di wawancarai adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul selaku wakil pemerintah yang membidangi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, Kepala Desa Bejiharjo selaku pemerintah setempat, kelompok sadar wisata selaku pengelola obyek wisata Goa Pindul, masyarakat sekitar obyek wisata,

Dalam penelitian ini metode dokumen ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian, yang dilakukan dengan cara mengambil data statistik. Dokumen tersebut meliputi dokumentasi proses sengketa dari pihak kepolisian, salinan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul serta dokumen data pendukung lainnya yang digunakan untuk mengolah data dan menentukan resolusi konflik pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di desa Bejiharjo, Kabupaten Gunungkidul.

D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan diolah menjadi data yang siap untuk disajikan, pengolahan data tersebut dilakukan dengan metode triangulasi, reduksi, penyajian data serta kesimpulan.

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut (Norman K. Denkin)

2. Reduksi

Reduksi merupakan teknik pengolahan data dengan merangkum, memilih dan menentukan hal-hal pokok ataupun poin-poin penting yang didapatkan dari penelitian. Dengan tahapan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang data yang di peroleh.

3. Penyajian Data

Setelah tahapan reduksi selesai, tahapan selanjutnya yang digunakan ialah penyajian data. Dimana penyajian data ini di susun berbentuk teks dan bersifat narasi yang menggambarkan hasil dari penelitian tersebut. Data disajikan

dengan mengelompokkan sesuai dengan sub-sub penelitian.

4. Kesimpulan

Tahapan terakhir yang dilakukan peneliti setelah melakukan penyajian data ialah penarikan kesimpulan. Dengan penjabaran berbagai data yang ada dan pengolahannya yang menggunakan berbagai tahapan peneliti dapat langsung menentukan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai penutup dalam penelitian yg dilaksanakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konflik Pengelolaan Goa Pindul

1. Awal Mula Konflik Pengelolaan Goa Pindul

Drama Konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul mulai muncul ke permukaan pada tahun 2012. Pada awalnya konflik tersebut melibatkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) bersama masyarakat sebagai pengelola obyek wisata Goa pindul dengan pemilik lahan yang ada di atas obyek wisata Goa pindul, namun permasalahan tersebut ikut menyeret Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Seiring berjalannya waktu konflik kian rumit ketika permasalahan yang muncul melibatkan sesama kelompok sadar wisata yang juga melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

a. Konflik antara Pemilik Lahan dengan Pokdarwis

Konflik yang melibatkan pihak pemilik lahan dengan kelompok sadar wisata ini bermula pada saat pemilik lahan yang ada di atas obyek wisata Goa Pindul yaitu saudara AD berniat untuk ikut andil dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul yang lokasinya berada di bawah lahan miliknya.

Langkah awal yang dilakukan saudara AD yaitu menggugat status atas hak kepemilikan lahan yang ada di atas Goa Pindul, AD menganggap bahwa kelompok sadar wisata yang dipelopori oleh Pokdarwis Dewa Bejo telah melakukan penyerobotan lahan dan melakukan usaha tanpa seizin pemiliknya.

Tidak hanya menggugat hak kepemilikan tanah, saudara AD juga berusaha untuk menghentikan aktifitas pariwisata yang ada di Goa Pindul dengan cara memasang portal agar Goa Pindul tidak dapat diakses, akan tetapi apa yang dilakukan saudara AD mendapat pertentangan dari masyarakat desa Bejiharjo. Masyarakat menilai bahwa pengelolaan obyek wisata Goa Pindul tidak melanggar peraturan apapun sehingga portal tersebut harus dibuka agar aktifitas pariwisata Goa Pindul dapat dijalankan sebagaimana biasanya, ujung dari permasalahan tersebut saudara AD melakukan

gugatan dan pelaporan kepada pihak penegak hukum.

Gugatan yang pertama dilakukan oleh saudara AD terjadi pada tanggal 30 Oktober 2012 yaitu terkait dengan dugaan penyerobotan lahan yang di dalamnya terdapat obyek wisata Goa Pindul. Gugatan tersebut dibuktikan dengan Laporan Polisi Nomor LP/751/X/2012/DIY Ditreskrim tanggal 30 Oktober 2012 tentang dugaan tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan portal, dugaan tindak pidana yang dimaksud yaitu tindak pidana penyerobotan lahan yang dikembangkan menjadi obyek wisata yaitu Goa Pindul.

Dalam kasus ini yang menjadi kekuatan pihak pemilik lahan adalah bukti dokumen sertifikat kepemilikan secara sah dan legal tanah yang ada di atas Goa Pindul atas nama AD yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), oleh sebab itulah pihak pemilik lahan kemudian bersikukuh untuk memperjuangkan haknya.

Gugatan yang kedua dilayangkan oleh pihak AD masih menyangkut permasalahan lahan yang di bawahnya terdapat obyek wisata Goa Pindul. Pada pelaporan yang kedua ini, pihak pemilik lahan menduga bahwa pengelolaan obyek wisata Goa Pindul yang dipelopori oleh kelompok sadar wisata Dewa Bejo telah melakukan pelanggaran tindak pidana yaitu menggunakan tanah tanpa seijin pemilikinya.

Dalam kasus tersebut kelompok sadar wisata Dewa Bejo diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 (UU No 51 PRP 1960) tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Gugatan tersebut dibuktikan dengan adanya bukti laporan Polisi Nomor LP/30/I/2013/DIY/Ditreskrim tanggal 15 Januari 2013 tentang dugaan tindak pidana menggunakan tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasa yang sah.

Permasalahan makin meruncing ketika saudara AD melakukan pelaporan yang ketiga, dalam laporannya saudara AD melaporkan adanya dugaan pengancaman dan percobaan pembunuhan terhadap pihaknya dalam konflik memperebutkan hak pengelolaan obyek wisata Goa Pindul. Laporan tersebut tertuang dalam bukti Laporan Polisi Nomor LP/28/III/2013/DIY/Res GNK tanggal 8 Maret 2013 tentang dugaan tindak pidana pengancaman dan percobaan pembunuhan.

Dari ketiga laporan tersebut tidak satupun yang sampai ke pengadilan dikarenakan tidak adanya bukti yang cukup sehingga pihak kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

b. Konflik antar Sesama Kelompok Sadar Wisata

Konflik yang melibatkan antar sesama masyarakat desa Bejiharjo ini berawal dari kemunculan kelompok-kelompok penggiat wisata di daerah Bejiharjo. Pada awal konflik timbul ke permukaan sedikitnya ada tujuh pokdarwis yang telah terbentuk. Pokdarwis tersebut diantaranya adalah Dewa Bejo, Panca Wisata, Wira Wisata, Karya Wisata, Tunas Wisata, Meriwis Putih, dan Panji Wisata namun saat penelitian ini dilakukan kelompok sadar wisata di desa Bejiharjo sudah bertambah menjadi sedikitnya sebelas kelompok sadar wisata.

Dari kesebelas Kelompok tersebut, yang mempunyai akses untuk mengelola obyek wisata goa pindul adalah Dewa Bejo, panca wisata, wira wisata dan karya wisata yang tergabung dalam naungan kelompok Dewa Bejo. Sedangkan bagi kelompok-kelompok yang lainnya ketika akan mengakses Goa pindul harus melalui keempat kelompok tersebut.

Permasalahan mulai timbul ketika beberapa kelompok yang tidak tergabung dalam kelompok Dewa Bejo menganggap bahwa seharusnya mereka pun dapat mengakses Goa Pindul secara bebas tanpa melalui keempat kelompok sadar wisata perintis tersebut. Sebagai asumsinya adalah bahwa mereka juga warga desa Bejiharjo, mempunyai ijin penyelenggaraan wisata yang juga sama dengan keempat kelompok perintis sehingga beberapa kelompok tersebut beranggapan bahwa mereka seharusnya mempunyai hak yang sama untuk mengakses daerah wisata tersebut.

2. Faktor Penyebab Konflik

Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dapat terjadi dalam proses interaksi sosial sehari-hari, baik antara sesama individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, kelompok masyarakat dengan pemerintah dan lainnya, semua itu berpotensi terjadinya konflik. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan atau adanya berbagai perbedaan pendapat dalam individu maupun kelompok sosial dalam masyarakat.

Konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul disebabkan adanya struktur ekonomi yang membuka kesempatan untuk dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan, dimana keberadaan goa pindul yang dikelola sebagai obyek wisata dianggap sebagai aset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian.

Struktur ekonomi yang dimaksud terlihat jelas dengan adanya peningkatan pendapatan yang begitu pesat di hasilkan oleh obyek wisata goa pindul setiap tahunnya. Peningkatan pendapatan tersebut dapat kami sajikan sebagai berikut ;

TABLE III. PENDAPATAN GOA PINDUL

No	Tahun	Pendapatan/ Tahun (Dalam Rupiah)
1	2010	460.000
2	2011	162.630.000
3	2012	1.806.090.000
4	2013	2.187.338.000

Sumber : Sekretariat Pokdarwis Dewa Bejo 2016

Selain adanya peningkatan dari segi pendapatan. Pengembangan obyek wisata ini, membuka peluang untuk masyarakat setempat dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja dalam mengelola obyek wisata ini.

TABLE IV. DATA PENYERAPAN TENAGA KERJA TAHUN 2013

No	Nama Pokdarwis	Data Tenaga Kerja 2013		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Dewa Bejo	104	18	122
2	Wira Wisata	130	20	150
3	Panca Wisata	155	3	118
4	Tunas Wisata	73	7	80
5	Meriwis Putih	50	5	55
JUMLAH				525

Sumber : Sekretariat Pokdarwis Dewa Bejo 2016

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, potensi obyek wisata goa pindul telah berhasil memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat desa Bejiharjo. Selain penyerapan tenaga kerja, pengelolaan obyek wisata goa pindul juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Hal ini tercermin dengan adanya penyerapan pedagang di area pengembangan obyek wisata goa pindul seperti pada tabel berikut ini :

TABLE V. DATA PENYERAPAN PEDAGANG TAHUN 2013

No	Nama Pokdarwis	Data Pedagang Tahun 2013		
		Suvenir	Kuliner	Jumlah
1	Dewa Bejo	6	13	19
2	Wira Wisata	8	18	22
3	Panca Wisata	12	9	21
4	Tunas Wisata	6	8	14
5	Meriwis Putih	2	4	6
JUMLAH				82

Sumber : Sekretariat Pokdarwis Dewa Bejo 2016

Adapaun beberapa faktor penyebab terjadinya konflik dalam pengelolaan pariwisata

dengan obyek wisata Goa Pindul dapat diuraikan dalam beberapa faktor dibawah ini :

a. Faktor Perbedaan Kepentingan

Perbedaan kepentingan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan konflik sosial. Perbedaan kepentingan merupakan sumber lain yang dapat menimbulkan pertentangan baik secara ekonomi, politik, dan sebagainya.

Dalam konflik yang terjadi pada pengelolaan obyek wisata goa pindul, perbedaan kepentingan terjadi antara masyarakat desa bejiharjo yang tergabung dalam beberapa kelompok sadar wisata dengan pemilik lahan yang ada di atas obyek wisata Goa pindul.

Pemilik tanah didalam konflik ini mempunyai kepentingan mempertahankan hak atas kepemilikan tanah yang ada di atas obyek wisata goa pindul dan hak pengelolaan obyek wisata tersebut, sedangkan masyarakat desa bejiharjo yang tergabung dalam beberapa kelompok sadar wisata mempunyai kepentingan dalam hal mengakses pengelolaan obyek wisata goa pindul dan mempertahankan hak pengelolaan yang sudah di rintis oleh masyarakat.

b. Perubahan Sosial Masyarakat

Polemik pengelolaan objek wisata Gua Pindul berkaitan erat dengan pergeseran sosial budaya masyarakat sekitar. Dalam perkembangan dunia pariwisata terjadinya polemik merupakan hal yang lumrah.

Pertumbuhan wisata Goa Pindul dalam enam tahun terakhir mengakibatkan adanya pergeseran budaya masyarakat terutama dalam hal pencarian nafkah. Sebelum Goa Pindul berkembang pesat, masyarakat di sekitar lokasi wisata itu belum pernah berkecimpung di dunia wisata, sebelum adanya pengembangan pariwisata rata-rata masyarakat mencari nafkah dengan bekerja di bangunan, transportasi, serta pertanian.

Munculnya dunia wisata di desa Bejiharjo ini telah mengakibatkan adanya perubahan social dalam masyarakat. baik dari segi ekonomi maupun budaya.

Kehadiran wisatawan yang silih berganti dengan latar belakang budaya dan karakter yang berbeda berdampak pada perubahan atas budaya dan karakter masyarakat local. Dari segi ekonomi berdampak pada cara masyarakat dalam menambah penghasilan keluarga menjadi begitu mudah ketika dibandingkan pada saat masyarakat disibukkan dalam pengolahan lahan pertanian tentunya akan jauh berbeda. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut membuat

semua orang di daerah ini ingin mengikutinya.

3. Bentuk Konflik

Konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul merupakan konflik horizontal. Konflik horizontal terjadi antara masyarakat dengan masyarakat yaitu antara kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dengan Pokdarwis lainnya dan kelompok sadar wisata dengan pemilik lahan. Konflik ini dapat disebut konflik horizontal karena kedudukan para pelaku konflik statusnya setara.

4. Dampak Konflik

Adanya konflik tentu membuat banyak dampak bagi masyarakat yang teribat maupun tidak terlibat dalam suatu konflik, dampak yang ditimbulkan akibat dari suatu konflik tentunya ada yang positif dan ada juga yang berdampak negatif. Dalam konflik yang terjadi pada pengelolaan pariwisata dengan obyek wisata Goa Pindul dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Dampak Positif

1) Memperjelas Batas – Batas Diri

Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat memiliki tanggung jawab atas hak dan kewajiban yang mereka miliki. Senada dengan perihal tersebut, konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Goa pindul telah memperjelas batasan-batasan yang menjadi hak dari setiap individu masyarakat desa Bejiharjo baik secara pribadi maupun kelompok dan kewajiban- kewajiban yang harus dipatuhi.

2) Adanya Hikmah yang Dapat Dipetik

Ungkapan ambillah hikmah dibalik peristiwa yang terjadi merupakan ungkapan yang sangat tepat untuk menjelaskan adanya hikmah dibalik konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul.

Dengan adanya konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul ini, hikmah yang dapat dipetik oleh masyarakat yaitu masyarakat dapat memahami batasan-batasan yang menjadi hak dan kewajiban bagi setiap individu masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul serta masyarakat lebih berhati-hati dan saling menjaga solidaritas guna menjaga keutuhan dan kerukunan ditengah masyarakat desa Bejiharjo.

b. Dampak Negatif

1) Perpecahan

Adanya konflik yang terjadi di dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul berdampak pada berkurangnya tingkat kerukunan dalam masyarakat, bahkan diantara kelompok masyarakat saling curiga

menunjukkan bahwa adanya dampak negative dari konflik tersebut yaitu perpecahan.

2) Menimbulkan Prasangka Negatif

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul berdampak pada prasangka-prasangka negatif yang timbul di tengah masyarakat.

Permasalahan yang dapat ditimbulkan dengan adanya prasangka-prasangka negative ditengah masyarakat yaitu dapat menimbulkan ketidak nyamanan yang dirasakan setiap masyarakat.

5. Aktor-aktor Dalam Konflik

Dalam konflik pengelolaan pariwisata dengan obyek wisata Goa Pindul ada beberapa aktor yang terlibat, yaitu :

- a. Pemilik lahan
- b. Masyarakat Desa Bejiharjo
- c. Kelompok Sadar Wisata
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkiul.

B. Resolusi Konflik Pengelolaan Goa Pindul

Resolusi konflik merupakan suatu upaya dalam menangani berbagai sebab terjadinya konflik, dan kemudian berusaha untuk membangun suatu hubungan yang baru yang diharapkan mampu bertahan lama. Adapun resolusi konflik dalam penelitian ini akan difokuskan pada tiga fase yang dapat dilakukan dalam upaya mengatasi konflik yaitu *Peace Making*, *Peace Keeping*, dan *Peace Building*.

1. Peace Making

Pada pendekatan pertama didalam penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul, upaya *peace keeping* telah dilakukan melalui adanya intervensi dari pemerintah kabupaten Gunungkidul dengan diterbitkannya peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul no 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dan Peraturan bupati Gunungkidul no 3 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 5 tahun 2013. serta peraturan bupati Gunungkidul no 56 tahun 2014 Tentang Perubahan atas peraturan bupati Gunungkidul nomor 3 tahun 2014. Selain melalui intervensi kebijakan tersebut, pemerintah kabupaten gunungkidul telah berupaya agar pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pengadilan.

2. Peace Keeping

Upaya lanjutan untuk menyelesaikan konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul melalui mediasi dan negosiasi juga dilakukan, upaya ini dinamakan pendekatan *peace making*. Pemerintah kabupaten Gunungkidul sebagai pihak yang

menaungi segala aspek penyelenggaraan kepariwisataan di kabupaten Gunungkidul turut mengambil peran dalam mendamaikan konflik yang ada di desa bejiharjo tersebut. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendesak agar semua pihak yang terlibat dalam konflik dapat mengakhiri pertikaian tersebut.

Upaya mediasi dan negosiasi antar pihak-pihak yang berkonflik telah difasilitasi oleh pemerintah kabupaten Gunungkidul bersama dengan pemerintah desa Bejiharjo, namun dari berbagai upaya tersebut konflik antara pihak pemilik lahan dan kelompok sadar wisata tidak pernah menghasilkan titik temu, sehingga potensi konflik untuk timbul kembali masih sangat tinggi. Sedangkan, konflik antar sesama kelompok sadar wisata dapat diselesaikan dengan adanya kesepakatan untuk melakukan kerjasama antar sesama kelompok sadar wisata. Kesepakatan tersebut disepakati dengan adanya penandatanganan MOU kerjasama yang ditandatangani oleh semua kelompok sadar wisata yang ada di Desa Bejiharjo disaksikan oleh perwakilan pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, Polres Gunungkidul dan pemerintah desa

3. *Peace Building*.

Upaya *peace building* pada konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul ini terlihat pada upaya-upaya untuk memperbaiki dan membangun kembali tatanan kehidupan masyarakat Desa Bejiharjo pasca konflik, dibentuk suatu badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDes yang diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan dalam pengelolaan obyek wisata tersebut dapat lebih tertata serta dapat mengakomodir semua elemen dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konflik dan resolusi konflik dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di desa Bejiharjo, kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

1. Konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul disebabkan adanya struktur ekonomi yang membuka kesempatan untuk dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan dan ketiadaan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul serta Adanya perbedaan pemahaman tentang sistem kepemilikan tanah yang dapat dikelola dan dimiliki secara pribadi oleh masyarakat.
2. Konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul awalnya diselesaikan dengan model alternative baik arbitrase maupun mediasi, kemudian

berlanjut ke intervensi pihak ketiga yaitu pengadilan namun, dari berbagai upaya tersebut belum ada titik temu yang dapat membendung konflik ini terjadi.

3. Peran pemerintah sebagai regulator di dalam menangani konflik antar sesama kelompok sadar wisata terlihat dengan lahirnya regulasi tentang penyelenggaraan kepariwisataan yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul no 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afrizal, Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer. Padang: Andalas University Press 2006.
- [2] Fisher, Simon, mengelola konflik : keterampilan dan strategi untuk bertindak (edisi bahasa Indonesia) Jakarta: The British Council Indonesia 2001.
- [3] G.Pruitt, Dean dan Jeffrey Z Rubin, Teori Konflik Sosial, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2004.
- [4] Sembiring, Resolusi Konflik Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Teluk wondama2010 : <http://mail.student.ipb.ac.id/index.php/jmht/article/viewFile/1996/889>
- [5] Wijono, Konflik Dalam Organisasi. Semarang: Satya Wacana 1993.